

Acehnologi : Menebah Tanda-Tanda Kebudayaan

Teuku Kemal Fasya¹

“Hari yang ditunggu-tunggu. Sesudah semua urusan pemakaman yang paling penting selesai, baru pembagian warisan diatur. Jadi dimaksudkan hari itu telah tiba (*ka trok uroe*), yakni hari ke-44 atau ke-100 sesudah kematian.”²

Cuplikan kalimat di atas diambil dari buku karangan Dr. Snouck C. Hurgronje, *Aceh : Rakyat dan Adat Istiadatnya*, (1893). Bagian itu menjelaskan tentang momentum pembagian warisan di Aceh yang dianggap baru diadakan pada hari *khanduri rayeuk*, yaitu pada hari ke-44 kematian. Di situ juga disebutkan bahwa yang berwenang melakukan pembagian warisan adalah *uleebalang* jika diminta oleh *keuchik* atau *teungku gampong*. Untuk proses itu ia mendapatkan 10 persen dari pembagian yang disebut dengan *ha' pra'e* (*haq al-fara-idh*).

Buku itu berisi tiga bab besar, yang berbicara tentang Aceh dari sisi demografis, pemerintahan, dan peradilan; perayaan, musim pertanian, hukum tanah dan air; dan kehidupan keluarga dan hukumnya.

Bukan itu saja, Hurgronje juga menerbitkan satu buku lain yang sama tebalnya tentang salah satu suku Aceh, *Tanah Gayo dan Penduduknya*. Di kedua buku itu Hurgronje fasih menggunakan istilah dan kalimat lokal, yang menandakan bahwa ia menguasai bahasa itu dengan sangat baik. Satu bab yang membuat saya berhutang budi dengan penemuan antropologis Hurgronje adalah pembahasannya tentang Suku Gayo bersatu perasaan dengan Aceh dalam keikutsertaan dengan perang melawan Belanda ; sebuah penanda yang menunjukkan kulturasi yang baik terjadi di masa lampau, namun politik kontemporer seperti membangun fragmentasi antar-suku itu di Aceh.

Mungkin saja gambaran etnografis yang dikumpulkan oleh Hurgronje berdasarkan pengamatannya bertahun-tahun itu ada bagian yang dianggap sumir atau politis. Seperti penggambarannya tentang fungsi *meunasah*³ yang sangat penting bagi kehidupan sosial-budaya. Ia sebutkan dalam bukunya bahwa salah satu fungsi *meunasah* adalah tempat pertunjukan sandiwara selepas tarawih. Apabila ada orang kampung yang tidak hadir dalam *piasan malam* itu, akan ada sekelompok pemuda yang memukul *tambo* (tambur besar *meunasah*) di halaman rumah masyarakat yang tidak berpartisipasi

¹ Dosen Antropologi FISIP Universitas Malikussaleh.

² Snouck Hurgronje, *Aceh : Rakyat dan Adat Istiadatnya*, (Jakarta : INIS, 1996), hal. 343.

³ Meunasah adalah mesjid mini atau dalam bahasa Melayu disebut surau atau langgar.

itu, untuk mempermalukan tuan rumah hingga ia bergabung ke *meunasah* bersama masyarakat lainnya.⁴

Alam kontemporer kita tentu akan bertanya apakah ada dalam sejarah Aceh fungsi *meunasah* seperti itu? Meski tetap ada, paling praktik *meunasah* adalah untuk perayaan *barzanji* atau *dalae kheirat*.⁵ Alam pikir modern kita yang dipengaruhi oleh Islam politik, menganggap praktik seperti ini pasti suatu bid'ah. Demikianlah, dengan segala pertimbangan saya menyatakan buku ini sedikit banyak membantu kita untuk meraba zaman itu, bahwa *meunasah* pernah menjadi tempat pementasan opera rakyat!

Dalam rentang seratus tahun terakhir, saya tidak lagi menemukan ada sebuah karya yang mampu merekonstruksi kebudayaan Aceh atau melakukan revisi total dari apa yang telah dilakukan oleh Hurgronje. Bahkan selama ini beberapa dokumen kebudayaan dan adat Aceh – secara diam-diam atau malu-malu kucing telah mengambil saja hasil dari buku ini tanpa pernah menyebutkan sumbernya. Praktik plagiasi terjadi beriringan dengan kematian tradisi penulisan hal-hal yang baru dengan bahasa baru.

Acehnologi Sebagai Epistimologi

Apa yang dituliskan oleh Snouck Hurgronje bisa disebut sebagai Acehnologi atau pengetahuan tentang Aceh. Hurgronje mengambil jalan antropologi untuk menggambarkan Aceh sebagai sekumpulan masyarakat yang - dalam bahas Max Weber disebut – “sedang memintal jaring-jaring makna kehidupannya.”

Kenyataan ini menjadi penting karena dalam konstruksi kebudayaan, Aceh adalah salah satu kerajaan besar pada abad 16 di wilayah di Asia Tenggara yang paling sedikit melahirkan tulisan atau buku-buku terjemahan ke dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Dibandingkan dengan Jawa, Bali, dan Batak, yang dianggap sebagai lumbung antropologis bagi peneliti Barat dan nasional, tulisan Aceh bahkan bisa dikatakan paling minim. Hal ini tak lepas dari situasi politik yang mendera Aceh selama lima dekade terakhir, sehingga tulisan yang berasal dari penelitian kebudayaan dan etnik tidak terbit dengan intensitas baik.

⁴ *Ibid*, hal.183.

⁵ Asal kata ini berasal dari bahasa Arab, *ad-dalail ul-khairat*, yang berarti dalil-dalil yang baik, yang dimaksudkan tentu saja mengambil cuplikan al-Quran atau nama-nama yang berasal dari sifat Allah yang kemudian disenandungkan dengan syair dalam bahasa Aceh. Suatu ketika pada tahun 2002, Prof. T. Ibrahim Alfian pernah mengatakan kepada saya untuk menghidupkan *dalae kheirat* di Yogyakarta, namun karena tidak ada mahasiswa Aceh perantauan yang menguasai seni bersyair ini lagi, rencana itu tak pernah terwujud hingga ia meninggal pada 2006.

Beberapa karya yang mengemuka memang akhirnya lebih sebagai tulisan politik seperti Sidney Jones, Lesley McCulloch, Edward Aspinall, Olle Toernquist, Damien Kingsburry, dsb. Dalam tulisan-tulisan politik itu aspek historis tidak ditemukan, atau kalau ditemukan sangat kering, karena memang latar belakang penulis sebagai peneliti politik dan hukum internasional. Namun tetap karya-karya tersebut dapat digolongkan sebagai kajian politik atau sosiologi konteks Aceh. Jangan ditanya jika harus memasukkan sejarah Majapahit, Sriwijaya, Siam, Laos, yang berumur lebih tua dari kerajaan Aceh atau kebudayaan China, Persia, dan India dalam ensiklopedia etnografis sangat kaya dan telah menghasilkan ribuan buku.⁶

Konstruksi antropologi membangun sistem besar kebudayaan masyarakat melalui pilar keyakinan, tradisi ritual, sistem ekonomi, kesenian, kekerabatan, dan keluarga – seperti yang dituliskan Hurgronje akhirnya mampu mendekatkan pemahaman tentang apa yang dimaksudkan dengan Aceh. Kini perkembangan antropologi telah sampai pada taraf etnografi, bahwa tidak ada konsep esensialisme masyarakat yang dapat dipahami secara umum, kecuali dilihat dari asal-usul atau keterikatan etnisnya. Sebagai sebuah studi yang tidak akan habisnya, pengalaman ini bisa dipecah menjadi studi etnografi konflik, etnografi pesisir, etnografi perkotaan, atau etnografi imigran.

Permasalahannya apakah selama ini Aceh sebagai basis pengetahuan atau epistemologi tidak ada? Ada tentu saja, meski tidak banyak. Termasuk pengalaman kompleksitas konflik dan globalisasi Aceh akibat tsunami beberapa waktu lalu, yang telah melahirkan beberapa buku. Akan tetapi sedikit di antaranya bermutu, karena lebih sebagai buku proyek laporan kerja NGO. Penggambarannya yang dideskripsikan tentang Aceh sering kali bersifat pejoratif, reduksionis, dan kolonial.⁷

⁶ Sebagai perbandingan ensiklopedia China telah menghasilkan 240 jilid pada tahun 1780, dan jilid itu terus bertambah hingga saat ini. Ketika saya ke Chennai, ibukota Tamil Nadu, pada sebuah toko buku di *mall*, saya temukan satu blok buku yang isinya tentang sejarah dan kebudayaan Tamil yang ditulis beragam penulis, dengan bahasa Inggris dan Tamil. Dari sebuah buku yang berat hingga buku populer tentang Tamil tersedia. Di Indonesia, kita hanya memiliki sedikit orang yang gigih melakukan penelitian atau penyusunan ensiklopedia suku bangsa. Di antara yang sedikit itu adalah seorang profesor antropologi Universitas Indonesia, Junus Melalatoa, yang berdarah Gayo. Ia telah berhasil menangkap cerita 520 suku bangsa Indonesia dari 600 yang diperkirakan ada. Mungkin saat ini suku-suku bangsa itu ada yang mulai punah, ditandai dengan hilangnya bahasa ibu suku itu akibat modernisme. Buku itu masih penjelasan serba singkat tentang suku bangsa di Indonesia dan belum menjadi *thick description* yang bisa menggambarkan dunia yang kecil itu di tengah kebudayaan nusantara. Bagaimana pula dengan Aceh yang terdiri dari sembilan suku dan dua suku migran?

⁷ Bagi yang bekerja di lembaga-lembaga donor internasional di awal bencana tsunami tentu mengenal istilah *assessment*, yaitu semacam penelitian sederhana untuk melihat kapasitas masyarakat yang akan dibantu – NGO menggunakan istilah *beneficiaries* (kelompok yang akan mengambil untung). Hasil *assessment* inilah yang dijadikan acuan untuk memberi bantuan kepada masyarakat korban. Namun sayangnya dari beberapa *assessment* yang dilakukan oleh peneliti-peneliti amatir NGO itu, banyak yang sangat dangkal makna kemasyarakatan yang dibangun, rendah kualitasnya kebudayaannya, bahkan distortif informasinya. Saya sempat mendengar pernyataan seorang aktivis yang bekerja di NGO internasional yang berasal dari provinsi sebelah Aceh menyatakan masyarakat Aceh malas, tergantung, dan mata duitan, dan karenanya jangan pernah dibantu uang. Penilaian seperti ini bahkan lebih kolonial jika kita bandingkan dengan tulisan-tulisan Hurgronje. Bahkan tulisan H.C Zentgraaff, yang berjudul *Aceh* (Jakarta : Beuna, 1983) menyebut Aceh gila dan sekaligus

Acehnologi yang ditawarkan di sini adalah Aceh sebagai basis epistemologi dan bukan sekedar objek pengetahuan yang diobjektifikasi tangan-tangan luar. Namun di sini saya juga tidak menganjurkan untuk memasang “mata macan” ketika memulai membaca tulisan-tulisan yang dihasilkan pihak luar tentang Aceh. Ada banyak tulisan yang sebenarnya bisa mengantar kita pada pemahaman yang objektif, komprehensif, dan positif, seperti dapat dilihat dalam tulisan Denys Lombard tentang *Kerajaan Aceh* (Jakarta : Gramedia, 2006), Anthony Reid pada *An Indonesian Frontier : Acehnese and Other Histories of Sumatera* (Singapore University Press, 2005) dan *Perjuangan Rakyat : Revolusi dan Hancurnya Kerajaan Sumatera* (Jakarta : Sinar Harapan, 1987), atau penulis Belanda seperti Paul Van't Veer, *Perang Aceh* (Grafitipress: Jakarta, 1985) yang menggambarkan instabilitas politik Belanda karena membiayai perang Aceh yang berlangsung dalam empat babak dan termasuk sejarah perang terburuk kerajaan Eropa Barat itu.

Bagaimana agar Aceh dapat dirumuskan menjadi sebuah epistemologi pengetahuan kritis dan memiliki bangunan yang rigor dan terstruktur? Pertama tentu saja apa yang disebut dengan Acehnologi ini tidak dapat dilepaskan dari bangunan pengetahuan sosial-humaniora yang telah berkembang sejak abad pencerahan (abad 17). Etika epistemologi Acehnologi ini harus mampu merangkum beberapa elemen bahwa *episteme* yang ditawarkan memang berbeda dan memiliki *point of departure* dan *point of arrival* yang khas dengan etnik lainnya. Asumsi-asumsi filosofis bahwa pengetahuan itu harusnya netral, objektif, bebas-dinilai (*free-valued*), dimana manusia Aceh harus ditempatkan sebagai subjek yang berbicara dalam konteks pengetahuan itu dan alam Aceh adalah objeknya.

Dengan pendasaran ini kita akhirnya dapat mengenali bahwa yang dimaksud dengan Acehnologi adalah pengetahuan-pengetahuan yang berelasi dengan peran manusia sebagai subjek yang berbicara, dan bukan peran alam Aceh. Sehingga ilmu seperti pertanian, ekonomi, geologi, geografi, matematika bukanlah masuk dalam rumpun Acehnologi. Manusia dan kebudayaan Aceh adalah pelaku-pelaku historis dalam pengetahuan itu, yang selanjutnya menjadi narasi besar dalam pakaian pengetahuan yang dikenakannya.

Untuk itu tentu saja pengetahuan antropologi, sosiologi, ilmu politik, etnografi, sastra, musikologi, sejarah dan *local wisdom* masyarakat Aceh dapat dimasukkan ke dalam Acehnologi. Pengetahuan semodel ini memerlukan metode *up date* yang lebih sering dibandingkan dengan ilmu-ilmu eksakta atau alam, karena di dalamnya ada unsur yang dalam bahasa Hans Georg Gadamer disebut

Belanda gila; sebuah perspektif yang tidak “brutal” memahami masyarakat lain (*the other*), yang dengan cepat menilai diri (*the self*) melalui proses dialektika dan refleksi yang maksimal. Satu tulisan terbaru yang menurut saya juga sangat berbau kolonial adalah tulisan Sidney Jones yang merupakan laporan International Crisis Group, berjudul *Jihadi Surprise in Aceh* (April 2010), yang dalam batas tertentu telah mendikte pemerintah Indonesia untuk mengambil tindakan yang melawan kemanusiaan seperti kontrol terus-menerus terhadap narapidana teroris, bahkan ketika mereka telah lepas dari hukuman.

Wirkungsgesichte,⁸ atau kemampuan untuk menafsirkan sejarah manusia secara terus-menerus dan memasukkan aspek-aspek kebaruan manusia sebagai makhluk yang berkembang bersama waktu.

Inilah yang dapat dijadikan sebagai jembatan pengetahuan agar yang dihasilkan penulis sebelumnya tentang Aceh tidak menjadi - seperti dalam istilah Michel Foucault - terputus (*rupture*) atau tidak berkesinambungan (*dis-continue*). Pengetahuan memerlukan tali, seperti juga konsep religiusitas Aceh yang digambarkan James T. Siegel dalam *Rope of God*, sebagai perantara Tuhan di bumi Aceh.

Situasi kita sekarang ini mengalami kebutaan atau gangguan visual ketika membaca naskah-naskah klasik tentang Aceh seperti karya Snouck Hurgronje atau penulis-penulis asing, yaitu situasi sulit berkembang di dalam bacaan. Dalam kajian filsafat linguistik dikenal istilah dekonstruksi, yang diperkenalkan oleh Jacques Derrida. Konsep dekonstruksi yang dimaksudkan oleh Derrida ini adalah bukan membongkar bangunan dari pengetahuan sebelumnya, karena kalau itu dilakukan sebenarnya lebih tepat disebut sebagai destruksi, yaitu merusak teks yang dibaca. Dekonstruksi adalah melakukan proses radikalitas dari bacaan dengan maksud mencari otentisitas nilai atau kebenaran dari jejak yang ditinggalkan tulisan itu. Jadi mendekonstruksi tulisan Snouck Hurgronje dalam perspektif sama dengan yang dimaksudkan oleh Heidegger, yaitu menyingkap (*aletheia*) histori dan misteri dari tulisan masa lalu itu dan mengambil kebenaran yang ditinggalkan. Atau dengan bahasa sederhana adalah “menunda” mengonsumsi kebenaran literal dari tulisan yang ada dan mencari unsur yang “membedakan” dengan referensi-referensi yang lainnya. Inilah jalan menuju otentitas pengetahuan, dan jalan ini bisa dilakukan dalam kajian Acehnologi.

Bagi saya jalan Acehnologi yang harus ditapaki ini adalah keran pembuka seluruh kanal-kanal informasi/historis agar arus narasi yang dijejaki oleh penulis sebelumnya dapat bertemu dengan semangat pencarian di era sekarang. Untuk itu diperlukan elan vital nalar yang sehat dan tidak primordial ketika membangun metode penemuan-penemuan baru pengetahuan atas nama Acehnologi. Aceh memang harus terus ditafsirkan sebagai basis pengetahuan kontemporer. Makanya sebenarnya tidak ada yang boleh dikatakan sebagai pengetahuan afkiran, palsu, manipulatif, karena ketika ia masih bertahan oleh proses cetak-ulang, terjemahan ke dalam Bahasa Indonesia, dipercakapkan dalam bahasa lokal, atau dikaji oleh para pakar-pakar ilmu sosial-humaniora, ia sebenarnya pengetahuan yang layak diapresiasi.

Reproduksi pengetahuan Aceh itu akan menjadi proses yang kreatif bertahan lama jika didokumentasikan dalam bentuk tulisan, dan bukan hanya percakapan seminar atau tulisan jurnalistik yang berlogika pendek. Ia harus dituliskan ke dalam buku, yang bisa menyingkap proses dialektika yang dilakukan, yaitu mempertemukan tesis, anti-tesis, dan sintesis dalam proses yang tertib dan demokratis sehingga hadir sebagai sebuah *episteme* baru yang utuh. Sibuk hanya membuat anti-tesis tanpa ada keberanian untuk mereformulasikan ke dalam sintesis hanya menjadi

⁸ Muhammad Al Fayyad, Derrida, (Yogyakarta : LkiS, 2005), hal. 14.

tindakan abai tanggung jawab, dan karenanya tidak dapat dikonsumsi dengan benar oleh pembaca selanjutnya. Memakai istilah Roland Barthes, kita memerlukan tulisan yang *writerly*, yang menyemangati orang agar lebih tahu untuk memproduksi tulisan lagi ke depan, bukan hanya tulisan yang *readerly*, yang hanya memuaskan ego sendiri dan “tak terbaca” oleh pembaca lainnya.

Strategi yang dilakukan adalah menuliskan dalam ke bahasa yang bisa menjamin konsep *clara et distincta*, terang dan jernih. Keras sekaligus tertib. Kita meneruskan strategi pengetahuan dengan menjamin bahwa bahasa yang digunakan dapat menampung perkembangan bahasa itu sendiri, dari sisi filologis, gramatis, dan epistemologis (bahasa sebagai pengetahuan dan bukan hanya alat komunikasi). Bahasa itu harus membuka ruang bagi metafora, metonimi, dan antropomorfisme – dalam hal ini Bahasa Indonesia cukup punya ruang dijadikan alas untuk pengembangan Acehnologi atau Bahasa asing yang diakui sebagai bahasa internasional, demi kepentingan jejaring dan respons luas, seperti Bahasa Inggris, Arab, atau Perancis. Strategi pengembangan Acehnologi akan bertemu ruang dengan pengembangan penggunaan Bahasa Indonesia yang benar, dan bukan bahasa Indonesia yang *ngawur*, dipolitisasi, atau tercengkram oleh dialek, istilah, atau idiom bahasa daerah tertentu.

Acehnologi Bersensitif Etnik

Dalam beberapa kali pelatihan yang memasukkan tema kebudayaan Aceh saya sempat menanyakan peserta yang rata-rata masyarakat Aceh tentang berapa etnis yang hidup di punggung Provinsi Aceh ini. Hampir semua peserta tidak dapat menyebutkan dengan benar etnis-etnis yang ada di Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan etnis yang riil di Aceh tidak dipahami, atau mungkin diketahui tapi tidak diperhatikan.

Hal yang paling mengemuka, bahwa etnis-etnis yang beragam itu tidak hidup dalam sebuah pertukaran wacana kebudayaan yang sehat. Etnis ada, tapi informasi dari orang berbeda etnis sangat minim.

Atau sebenarnya hal itu yang benar? Karena penggunaan istilah etnis sendiri dianggap bukan berasal dari *lingua franca* Melayu-Indonesia, sehingga banyak orang tak tahu memaknai secara tepat seperti apa. Jika kita misalnya mengambil pemahaman etnis dari bahasa Latin *ethnos* yang berarti bukan keturunan Yahudi (*gentile*)⁹ atau kafir (*heathen*), maka tepat ketidaktahuan peserta Aceh tentang “orang-orang lain yang hidup di sekitarnya”. Dalam bahasa Inggris atau pola pemikiran Eropa hal ini memang meninggalkan banyak ambivalensi, sehingga menyebabkan penyebutan etnik akan melahirkan konflik yang berkepanjangan, karena berarti “mengeluarkan kelompok dominan dalam

⁹ Dalam kamus Bahasa Inggris seperti Weber dan Oxford memang menerjemahkan ethnic dengan arti *non-israelite*, atau bukan dari keturunan Yahudi.

sebutan etnik, dan kemudian memunculkan pemahaman etnisitas minus satu”, seperti digambarkan Werner Sollors dalam tulisannya.¹⁰

Tetapi Bahasa Indonesia memiliki keunggulan dalam menyebut istilah etnik dengan suku-bangsa.¹¹ Suku bangsa berarti adalah bagian dari bangsa yang menjadi payung untuk suku-suku itu. Maka jelas di sini suku Aceh adalah bagian dari daerah atau “bangsa” Aceh, seperti suku-suku lainnya seperti Gayo, Alas, Tamiang, Singkil, Aneuk Jamee, Simeulue, dan Kluet. Ditambah suku *creol* atau suku yang hibrida yang hidup-berkembang di daerah yang berbatasan dengan Sumatera Utara seperti Pakpak dan Dairi. Atau suku atau ras migran yang berkembang di Aceh dan memiliki identitas sendiri seperti Jawa dan China.¹²

Hal inilah yang harus diubah di Aceh. Pendekatan yang dilakukan Acehnologi bukan untuk memperbesar egoisme suku Aceh yang kebetulan berpopulasi paling besar yaitu 70 persen dan mayoritas mendiami wilayah Sabang, Banda Aceh, Aceh Jaya, Pidie, Pidie Jaya, Bireun, Lhokseumawe, Aceh Utara, dan Aceh Timur, tapi menjadi jalan untuk mendiseminasi 30 persen dari suku-suku minoritas lainnya. Imajinasi yang perlu dibangun dengan kajian Acehnologi adalah Aceh yang plural, dan sejarah pluralismenya berangkat dari sejarah migrasi, akulturasi, dan asimilasi. Atau dalam bahasa Homi K. Bhaba situasi ini bisa disebut “*gathering of exiles and emigrés and refugees, gathering on the edge of foreign cultures; gathering at the frontiers; gathering in the ghettos or café of city centres.*”¹³ Membicarakan Acehnologi dalam perspektif suku-bangsa adalah mengeksiminasi konsep multikulturalisme secara praksis.

Sensitivitas etnis-etnis penting karena selama ini yang terjadi di Aceh adalah mengumpalnya kekuatan politik-kultural-ekonomi-wacana ke dalam perspektif mayoritas. Ini berbahaya. Sebagai daerah yang tumbuh dari pengkloningan beragam kebudayaan belahan utara dunia dan mengalami proses proyeksi identitas berdasarkan Melayu dan Islam sebagai titik utama, Aceh juga harus sadar akan potensi perbedaannya intrinsiknya. Sekali lagi mengutip apa yang dikatakan Bhaba, Jika Aceh ingin

¹⁰ Werner Sollors, “Who is Ethnic” dalam Bill Aschroft et al, *The Post-Colonial Studies Reader*, (London : Routledge, 1995), hal. 219-222.

¹¹ Untuk hal ini kita pantas berterima-kasih kepada Prof. Parsudi Suparlan yang mengenalkan istilah ini untuk mengganti sebutan etnik dalam Bahasa Indonesia. Prof. Suparlan adalah seorang profesor antropologi yang kaku dan “ditakuti” oleh mahasiswa-mahasiswanya. Meninggal mengenaskan di rumahnya di Ciputat, karena tinggal seorang diri dan baru diketahui pada 27 Juni 2007.

¹² Walaupun dalam buku-buku sejarah Aceh disebutkan imigrasi populasi manusia utara ke Aceh berasal dari etnis beragam, seperti perdangan dan perkawinan dengan komunitas India belakang (Tamil, Sinhala), Timur tengah (Arab), Eropa (Portugis), dan Asia Barat daya (Pakistan dan Gujarat), tapi sebenarnya tidak menjadi suku bangsa atau ras tersendiri, karena di Aceh tidak ditemukan lagi komunitas yang berbahasa Tamil atau Gujarat, walaupun misalnya disebutkan penyebaran etnis Tamil di Beureunun, Aceh Pidie paling besar.

¹³ Homi K. Bhaba, “DissemiNation : Time, Narrative, and the Margins of the Modern Nation” dalam Homi K. Bhaba (ed), *Nation and Narration*, (London : Routledge, 1990), hal. 291.

berkembang, konstruksi kebudayaan harus berangkat dari proses mengumpulkan perca-perca kebudayaan, yang berserak, eksil, asing, minoritas, dan dalam beberapa hal kontradiktif dan berhimpun di bawah payung bersama - istilah mutakhir disebut multikulturalisme.

Berapa banyak masyarakat Aceh yang telah memiliki pemahaman yang utuh tentang Kluet, misalnya? Saya sendiri baru mengalami proses revisi pemahaman Kluet ketika mengunjungi tempat ini beberapa waktu lalu. Kluet seperti dikatakan seorang penduduk Kluet tidak dapat didefinisikan sebagai sebuah suku bangsa. Definisi paling netral tentang Kluet adalah sebuah wilayah, yang sebagian besar masih merupakan rimba raya dan masuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser. Sebagian besar penduduk Kluet bahkan berbahasa Aceh seperti Kluet Utara dan Pasiraja. Ada yang menggunakan bahasa *Jamee*¹⁴ seperti di Kluet Selatan, dan sedikit yang menggunakan bahasa Kluet seperti yang tinggal di Kecamatan Kluet Tengah. Bahasa Kluet sendiri secara fonetik dekat pengaruhnya dengan Bahasa Karo, Sumatera Utara.¹⁵ Siapa juga yang mengetahui bahwa Mohammad Hatta, wakil presiden R.I pertama pernah melakukan kunjungan kenegaraan di tahun 50-an melintasi pegunungan Kluet dan beristirahat di sebuah restoran kini disebut Jambo Hatta?

Atau siapakah dari penduduk Aceh daratan mengenal Simeulue sama baiknya seperti suku-suku di Simeulue sendiri?¹⁶ Mungkin bisa dihitung dengan sebelah tangan. Namun tak ada yang menyangka bahwa daerah besar dengan populasi kecil itu telah menarik perhatian seorang antropolog kelautan Jepang, Akifumi Iwabuchi, yang dengan penelitiannya bertahun-tahun di pulau eksotik itu dan melahirkan sebuah buku berharga untuk mengetahui Simeulue lebih dalam, *People of Simeulue*. Kesalahtafsiran atas suku-suku minoritas di Aceh akan teratasi jika ada pelajaran bersama untuk mengetahui eksistensinya dan menafsirkan kebudayaan mereka secara empatik.

Acehnologi untuk Etnografi, apalagi jika bisa menjadi bagian dari kurikulum lokal, dapat memperkenalkan Aceh secara lebih bijak dan benar kepada masyarakat Aceh dan nasional, sekaligus sebagai upaya untuk mendebunkan mitos primordialisme yang berpusat pada etnosentrisme, sebaliknya tetap menjaganya sebagai imajinasi kolektif tentang Aceh yang beragam. Itulah – sebut Edward W. Said – “garis batas dunia” Aceh yang harus dilalui. Secara strategis Acehnologi ini dapat menjadi instrumen kultural untuk meleburkan sikap tak mau tahu kepada suku-suku lain dan sikap sok tahu atas sejarah dan kebudayaan suku sendiri di Aceh.

¹⁴ Bahasa yang mirip dengan bahasa Minang atau Padang.

¹⁵ Penelitian lapangan 25 Juni 2010 dan gambaran tentang Kluet dari aktivis pemuda Kluet Utara, Marzuki.

¹⁶ Simeulue sendiri terdiri dari tiga suku: Devayan, Sigulai, dan Simoloi. Namun banyak masyarakat Simelue yang ketika keluar dari daerahnya malu menggunakan Bahasa Simelue. Mereka lebih memilih Bahasa *Aneuk Jamee*. Rasa rendah diri itu, di samping bahwa suku ini sangat kecil populasinya dibandingkan suku bangsa lainnya di Aceh, juga anggapan karena bahasa itu terdengar seperti suara burung, sehingga secara fonetik dianggap memalukan. Wawancara dengan Thayeb Loh Angen, 4 April 2010, wartawan Aceh yang pernah melihat pementasan kesenian lokal Simelue, Nandong, di pulau terpisah di barat Sumatera ini.

Jangan Lupakan Novel!

Situasi perdamaian Aceh di beberapa tahun terakhir ini membawa berkah yang besar. Salah satunya adalah lahirnya novel-novel yang mengangkat tema Aceh – terutama konflik, seperti yang ditulis oleh Arafat Nur (*Percikan Darah di Bunga*, 2005), Thayeb Loh Angen (*Teuntra Atom*, 2009), Ayi Jufridar (*Kabut Perang*, 2010), dll. Contoh ketiga novel ini telah memberikan gambaran tentang dunia konflik, dengan perspektif yang berbeda-beda. Ada yang melankolis-romantis, mitis, parodik, atau sinis. Beberapa penulis telah mulai menuliskan dari latar belakang sejarah seperti novel Putra Gara (*Samudera Pasai*, 2010) dan sebuah novel yang ketika tulisan ini dihadirkan masih dalam proses cetak, *Putroe Neng* (Ayi Jufridar).

Satu novel yang ditampilkan dengan wajah “berani” yang akan saya ulas adalah *Putroe Neng*. *Putroe Neng* atau sebenarnya nama lain Puteri Cina yang menjadi kekasih seorang raja Lamuri pada abad 11, dihadirkan melalui sebuah rekonstruksi sejarah yang tidak biasa. Ratu bom seks ini dapat dicari jejak sejarahnya berupa makam di Blang Pulo, daerah sekitar perumahan Arun, Lhokseumawe. Yang *pertama*, *Putroe Neng* ini digambarkan sebagai simbol berahi kerajaan dengan keanggunan dan *sex appeal* yang dimilikinya – sebuah model yang tak lazim dalam menggambarkan perempuan-perempuan di seputar kerajaan Islam seperti Aceh. Ketika membaca ini saya merasa melayang dengan legenda Cleopatra atau Ratu Balkis.

Kedua, idiom-idiom seks dan bahasa erotik membelukar kemana-mana dalam novel ini. Ketika saya membaca Novel ini ingatan saya mengawang ke seorang penulis erotis di era Perancis klasik, Sade, dan dalam buku Roland Barthes (*Sade/Forier/Loyola*, 1971) yang dianggap tokoh pendobrak borjuisme bahasa di masanya. Bagi saya novel ini sudah menjejakkan kakinya dalam khazanah novel sejarah Aceh dengan pendekatan seksualisme yang mensubversi bahasa protokoler. Novel ini menghidupkan sisi “ketidaksadaran” pembacanya bahwa yang dibacanya adalah riil.

Ketiga, yang menarik dari novel ini, seperti sebenarnya telah juga didahului beberapa novelis Aceh lainnya, adalah membunuh mitos dan sejarah kekuasaan dengan menjadikannya sebuah konstruksi sejarah manusiawi atau sejarah sosial biasa.

Peran novel sejarah sesungguhnya bisa menjadi panduan membongkar sejarah dan kebudayaan secara kritis. Dalam hal ini tentu saja peran yang paling besar adalah membunyikan kesunyian dan menjadikan “minoritas” bekerja mengonstruksikan dirinya dalam bahasa formal. Dalam hal ini novel-novel penulis Aceh - sampai saat ini saya belum menemukan ada novel Aceh yang absurd - semuanya masih dalam koridor realisme, dapat menjadikan penggalan untuk mengetahui bangunan-bangunan kebudayaan yang dianggap kokoh di masa lalu, namun sebenarnya tersaput kabut mitos.

Dari Novel *Putroe Neng*, kita bisa belajar untuk mendekonstruksi mitos kebesaran Aceh bahkan sebelum Sultan Iskandar Muda. Dari novel seperti ini kita bisa berjejaring dengan karya-karya sejarah yang ditulis dengan pendekatan rigoris bahkan terkesan sangat parokial, seperti karya-karya kanonik Aceh versi Denys Lombard, Anthony Reid, T. Ibrahim Alfian, Isa Sulaiman, dsb. Sembari menutup semua sumbat sumbang dari efek bahasa yang muncul berlebihan, novel sejarah membantu kita untuk terjun ke lembah pemahaman otentik. Dalam hal ini saya bersetuju jika novel juga dijadikan rujukan dalam melihat konstruksi Aceh secara lebih luas, yaitu wajah kebudayaan dan sejarah Aceh yang harus diperkaya dengan ingatan-ingatan memorial yang membentang, yang masuk dalam akal kesadaran kontemporer, dan *logos* (kebenaran) terbarukan untuk memahami dunia kekuasaan, politik, dan elite. Sejarah terlalu sedikit, padahal kita memerlukan narasi untuk bertahan lama.

Inilah sebenarnya dunia baru Acehnologi kita. Fiksi kritis dapat menjadi jalan untuk memahami kebudayaan dari perspektif *post-colonial*. Melalui pembebasan imajinasi yang diolah dari perasan urat-urat informasi sejarah, maka novel sejarah juga bisa menjadi pertimbangan sejarah juga, bukan hanya rekreatif atau fiktif.

Jika sebelumnya Antropologi dipahami sebagai ilmu meremukkan dunia jajahan (*discourse of imperialism*), kini, dengan bantuan novel dan pendekatan lain, Acehnologi dapat hadir dengan mengganti kesadaran kuno kolonial melalui pengalaman migrasi, diaspora, dan pergeseran budaya (*cultural displacement*) yang dialami penulisnya. Karena sesungguhnya ketika ia menuliskan novel tentang sejarah Aceh, dia sedang bersemangat untuk menghadirkan identitas Aceh dalam konsep yang lebih demokratis dan dipahami olehnya sebagai makhluk budaya kontemporer.

Jika demikian, selamat datang di dunia Acehnologi. Mari bergembira dalam berfikir dan berkebudayaan!

Teuku Kemal Fasya, Antropolog.

Dimuat di majalah *Basis* edisi 9-10, 2010.